PERANAN STANDAR MUTU DAN AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM REALITA MASYARAKAT INDONESIA

Muhamad Arif Mahdiannur

email: mahdiannur1@gmail.com

Abstrak

Kualitas pendidikan merupakan tolok ukur mengenai pencapaian standar nasional pendidikan. Perubahan dunia pendidikan di era inovasi disruptif membutuhkan sistem pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kelayakan untuk mencapai keinginan masyarakat. Studi ini menggunakan teknik analisis *big data* dari pangkalan data *Google Trends* untuk periode 2014-2018 yang difokuskan di wilayah Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami tentang kualitas pendidikan, akreditasi, dan keterkaitannya. Masyarakat juga belum dilibatkan dalam proses pemenuhan standar nasional pendidikan. Instrumen akreditasi satuan/institusi pendidikan hendaknya lebih difokuskan pada: (1) performa pengembangan organisasi satuan/institusi pendidikan; (2) evaluasi terhadap inovasi proses pendidikan yang dilakukan oleh suatu satuan/institusi pendidikan; (3) akuntabilitas, efektivitas, dan kepraktisan proses-proses pembelajaran oleh satuan/institusi pendidikan; serta (4) pengembangan kurikulum, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian yang digunakan oleh satuan/institusi pendidikan.

Kata Kunci: standar nasional pendidikan, akreditasi, masyarakat, Indonesia

Abstract

Quality of education is a benchmark for achieving national education standards. Changes in the world of education in the era of disruptive innovation require a quality education system and fulfill the feasibility of achieving the wishes of the community. This study used big data analysis techniques from Google Trends database for the 2014-2018 period that focused on the Indonesian region. The results of the study showed that the community doesn't understand the quality of education, accreditation, and its relevance. The community has also not been involved by the educational institution, in the process of meeting the Indonesian national education standards. The instrument of accreditation of educational institutions should be more focused on: (1) performance of the educational institutions development; (2) evaluation of the innovation of the educational process carried out by an educational institution; (3) accountability, effectiveness, and practicality of learning processes by the educational institutions; and (4) curriculum development, learning outcomes, and assessment systems used by the educational institutions.

Keywords: national education standards, accreditation, Indonesian community, Indonesia

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu parameter indeks pembangunan masyarakat. UUD 1945 juga menekankan pentingnya pendidikan nasional yang bersifat mencerdaskan kehidupan masyarakat serta memenuhi standar kelayakan. Pendidikan yang memenuhi kriteria kelayakan harus dapat diakses secara penuh oleh masyarakat di Indonesia. Pendidikan merupakan cikal bakal penemuan serta pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Penemuan serta pengembangan sains tersebut pada akhirnya akan memicu peningkatan peradaban bangsa. Di lain pihak, dunia pendidikan juga sedang mengalami perubahan besar terkait kualitas dan relevansi pendidikan serta penguasaan keterampilan abad ke-21 yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi (Chu, Reynolds, Tavares, Notari, & Lee, 2017). Selain itu, pendidikan 4.0 adalah pendidikan yang menekankan pada kreativitas dan inovasi (Sermisirikarnjana, Kiddee, & Pupat, 2017).

Berbagai laporan hasil penelitian di luar negeri menyimpulkan bahwa dunia pendidikan Indonesia dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju atau OECD. Ketertinggalan tersebut terutama di bidang sains, teknologi, dan literasi. Jika kita telaah lebih dalam maka salah satu penyebab ketertinggalan tersebut karena jarang atau bahkan tidak pernah guru menerapkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan inkuiri dan pendekatan keterampilan berpikir. Proses berpikir merupakan penyatuan dari komponen pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Orlich, Harder, Callahan, Trevisan, & Brown, 2010). Selain itu, kualitas guru dan dosen yang masih rendah serta kurangnya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan berbasis inovasi semakin menguatkan bahwa sistem pendidikan nasional kita membutuhkan revisi dan perbaikan yang masif, sistematis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil-hasil pengukuran dan evaluasi terkait sistem pendidikan nasional, maka ditetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah juga telah menetapkan regulasi terkait mutu pendidikan dan mewajibkan akreditasi bagi seluruh institusi dan level pendidikan dari tingkat pendidikan anak usia dini dan non-formal, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi. Implementasi dari kebijakan tersebut direalisasikan dengan dibentuknya Badan Akreditasi Nasional yang menangani akreditasi berdasarkan SNP. Seiring dengan inovasi disruptif yang berkembang dan kebijakan pemerintah terkait kelayakan pendidikan nasional, maka implementasi standar mutu dan akreditasi pendidikan dalam masyarakat Indonesia

menarik untuk dikaji dan ditelaah secara komprehensif berdasarkan data *Google Trends* untuk wilayah Indonesia periode 2014-2018. Oleh karena itu, tulisan ini akan difokuskan pada: (1) makna asli kualitas; (2) Kesadaran masyarakat Indonesia tentang akreditasi institusi pendidikan; serta (3) Peran standar mutu dan akreditasi terhadap pencapaian SNP dan pemahaman masyarakat tentang kualitas pendidikan.

B. Metode

Studi ini menggunakan analisis *big data* dari *Google Trends*, khususnya mengenai preferensi pencarian masyarakat Indonesia mengenai “akreditasi,” “mutu pendidikan,” dan “akreditasi sekolah.” Rentang waktu dibatasi lima tahun terakhir (2014-Mei 2018) dan lokasi pencarian dibatasi untuk wilayah Indonesia. Penggunaan tanda kutip (“”) dalam frasa kunci dimaksudkan agar hasil pencarian lebih spesifik dan hasilnya memenuhi validitas dan reliabilitas (Tran et al., 2017). Hasil tersebut kemudian dideskripsikan dan dibandingkan dengan studi kepustakaan terkait akreditasi dan SNP di Indonesia.

C. Diskusi

1. Apa itu Kualitas?

Kualitas merupakan suatu tolok ukur mengenai bagus atau tidaknya suatu hal. Kualitas sendiri bukan konsep yang baru ada di zaman modern, melainkan telah ada dan berkembang dari masa dan peradaban lampau seperti Mesir, Yunani, dan Romawi kuno (Elassy, 2015). Kualitas juga bukan merupakan konsep tunggal (Elassy, 2015). Konsep kualitas sendiri berdasarkan cara pendekatan interpretasinya sendiri terdiri atas 8 (delapan) macam, yaitu: (1) kualitas sebagai pemenuhan kriteria atau standar yang telah ditetapkan; (2) kualitas sebagai kemampuan untuk memenuhi tujuan; (3) kualitas adalah ciri efektivitas dalam meraih tujuan institusi; (4) kualitas sebagai pemenuhan keinginan konsumen; (5) kualitas dalam definisi tradisional; serta (6) kualitas menurut para pemangku kepentingan (akademik dan siswa) (Elassy, 2015). Banyaknya pendekatan dalam menafsirkan istilah kualitas, maka secara umum penyebab divergensinya definisi kualitas disebabkan oleh dua hal, yaitu kualitas merupakan sebuah konsep relatif dan kualitas digunakan dalam berbagai macam konteks yang terkait dengan istilah penjaminan mutu dan peningkatan mutu (Elassy, 2015; Williams, 2016).

Konsep penjaminan mutu (*quality assurance*) berasal dari sektor bisnis dan produksi yang kemudian diserap ke dalam sektor pendidikan yang terdiri atas dua hal, yakni penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal (Elassy, 2015; Williams, 2016). Penjaminan mutu yang berkelanjutan akan mendorong munculnya peningkatan mutu (*quality enhancement*) sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Proses penjaminan mutu dan peningkatan mutu saling terkait sebagai satu kesatuan, meskipun terdapat keduanya merupakan konsep yang berbeda (Elassy, 2015; Williams, 2016). Penjaminan mutu internal menjadi sangat vital, karena seluruh kebijakan, prosedur, sistem, dan praktik internal atau eksternal yang sedang dijalankan juga akan terganggu. Penjaminan mutu secara internal dan eksternal sengaja dirancang agar mampu mencapai, menjaga, dan meningkatkan akreditasi suatu lembaga (Elassy, 2015; Williams, 2016).

Berdasarkan instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF), Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M), serta Badan Akreditasi Pendidikan Tinggi (BAN PT) seluruhnya mengadopsi semua pendekatan interpretasi makna kualitas yang diuraikan oleh Elassy (2015). Instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh BAN PAUD dan PNF, BAN S/M, dan BAN PT seluruhnya disesuaikan dengan 8 (delapan) SNP, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, serta Standar Penilaian Pendidikan. Selain itu, sejak 2018 seluruh BAN merevisi instrumen penilaian akreditasi dengan menekankan pada aspek performa, tidak hanya menekankan pada ketersediaan dokumen dan aspek *input*.

2. Kesadaran Masyarakat Indonesia tentang Akreditasi Institusi Pendidikan

Keinginan masyarakat untuk menempuh pendidikan berkualitas meningkat seiring waktu. Masyarakat Indonesia umumnya percaya bahwa pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kesejahteraan dan kelayakan untuk hidup serta bebas dari cengkeraman kemiskinan. Tingkat partisipasi anak Indonesia untuk bersekolah berdasarkan data Badan Pusat Statistik cukup tinggi dan menunjukkan peningkatan yang positif. Di lain pihak, jumlah institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi juga mulai

meningkat. Banyaknya jumlah institusi pendidikan yang ada baik yang dikelola oleh negara maupun oleh swasta menjadikan masyarakat memiliki beragam pilihan untuk menentukan institusi pendidikan yang bermutu dan mampu mendidik dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. Selain itu, pendidikan tambahan privat (*shadow education*) seperti bimbingan belajar, juga marak berkembang untuk memenuhi keinginan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas institusi pendidikan tersebut tercermin dari penelusuran masyarakat Indonesia menggunakan mesin peramban Google. Berdasarkan data *Google Trends* untuk lokasi Indonesia dengan kata kunci “akreditasi”, “mutu pendidikan”, dan “akreditasi sekolah” untuk periode lima tahun terakhir menunjukkan hasil seperti pada Gambar 1.

Gambar 1 Kecenderungan hasil pencairan masyarakat terkait akreditasi dan mutu pendidikan (Sumber: *Google Trends*, Mei 2018)

Berdasarkan data pada Gambar 1 tersebut di atas, tampak perhatian masyarakat selama ini lebih utama pada akreditasi, khususnya akreditasi perguruan tinggi. Tren pencarian “akreditasi” tersebut mencapai puncak pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru. Hal ini menandakan bahwa masyarakat hanya memaknai akreditasi sebatas legalitas untuk memasuki dunia kerja, bukan untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraan program pendidikan berdasarkan SNP. Kesadaran

masyarakat tentang akreditasi sekolah dan kualitas pendidikan masih minim berdasarkan frekuensi pencarian di mesin peramban Google. Berdasarkan data *Google Trends* dari 2014-2018 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami SNP yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak 2005 silam melalui peraturan pemerintah. Selain itu, sinergi antara sekolah dan masyarakat masih belum terbangun sehingga kesadaran dan dukungan masyarakat terkait pemenuhan SNP oleh sekolah masih belum signifikan.

Masyarakat masih mengalami miskonsepsi terkait akreditasi dan pemenuhan SNP serta penjaminan dan peningkatan mutu. SNP merupakan standar acuan yang harus dicapai oleh setiap institusi pendidikan baik dari tingkat PAUD & PNF, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi. Selain itu, masih banyak data institusi pendidikan yang belum diakreditasi dan belum memenuhi seluruh komponen SNP. Masyarakat hanya peduli dengan peringkat akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi, karena hal tersebut memiliki efek langsung terhadap peluang diterima atau tidaknya seseorang di dunia kerja/industri yang akan memengaruhi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, serta status sosial. Perpindahan dari sekolah dasar dan menengah atau pendidikan non-formal ke pendidikan tinggi merupakan salah satu investasi personal dan pergeseran status sosial secara signifikan untuk berbagai kalangan (Briggs, Clark, & Hall, 2012).

3. Peran Standar Mutu dan Akreditasi terhadap Pemenuhan SNP dan Pemahaman Masyarakat tentang Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan satu proses yang sangat kompleks dan mencakup banyak hal, seperti siswa, guru, tenaga kependidikan (administrator), kurikulum, metode pembelajaran, dan teknik penilaian yang saling terkait dalam suatu alur yang cukup rumit (Elassy, 2015). Pemerintah Indonesia telah menetapkan 8 (delapan) komponen SNP yaitu, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK), Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, serta Standar Penilaian Pendidikan. SKL merupakan panduan dalam capaian pembelajaran yang akan diperoleh oleh peserta didik pada suatu jenjang pendidikan. Standar Isi merupakan tingkat kompetensi minimal pada suatu jenjang pendidikan. Standar Proses merupakan panduan dalam melaksanakan proses belajar-mengajar sesuai jenjang pendidikan. SPTK merupakan acuan kualifikasi minimal bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu jenjang pendidikan.

Standar Sarana dan Prasarana merupakan panduan sarana dan prasarana yang harus tersedia di suatu jenjang pendidikan untuk mendukung seluruh aktivitas warga suatu satuan pendidikan. Standar Pengelolaan merupakan panduan dalam mengelola dan mengatur seluruh komponen pada suatu jenjang pendidikan. Standar Pembiayaan merupakan panduan mengenai biaya investasi pendidikan, operasional institusi pendidikan, biaya pengembangan, dan biaya personal pada suatu jenjang pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan merupakan panduan dalam melaksanakan penilaian oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penilaian pada suatu jenjang pendidikan. Seluruh komponen tersebut berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, dengan penambahan aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dunia pendidikan tinggi, selain aspek pendidikan.

BAN PAUD dan PNF, BAN S/M, serta BAN PT selaku lembaga independen yang bertugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan penilaian akreditasi telah merumuskan instrumen penilaian akreditasi suatu lembaga pendidikan sesuai dengan SNP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem penilaian akreditasi tersebut pada dasarnya telah menggambarkan bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia bersifat kontinu dan berkesinambungan sesuai kriteria kualitas pendidikan. Berdasarkan data pada Gambar 1, memberikan suatu inferensi bahwa masyarakat lebih fokus pada peringkat akreditasi pada jenjang pendidikan tinggi, dibandingkan dengan peringkat akreditasi sekolah/madrasah serta lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Masyarakat belum menyadari bahwa setiap satuan/institusi pendidikan di tiap jenjang pendidikan baik formal maupun informal wajib untuk memenuhi seluruh standar mutu sesuai SNP yang berlaku secara nasional yang tercermin dari peringkat akreditasi.

Akreditasi memberikan kriteria bagi kualitas tenaga pendidik, pengembangan dan desain kurikulum, proses pembelajaran, pengukuran dan penilaian, penyediaan fasilitas pendukung belajar, peningkatan capaian kemampuan lulusan, serta transparansi, tata kelola, akuntabilitas dalam organisasi dan keuangan (Okoche, 2017). Berdasarkan hal tersebut, akreditasi harus memberikan kelayakan terhadap performa suatu satuan/institusi pendidikan pada tiga komponen penting, yaitu *input*, *process*, dan *output*. Jika kita telaah instrumen akreditasi untuk seluruh jenjang pendidikan tinggi, maka instrumen tersebut masih menekankan pada keberadaan dokumen. Penekanan pada kualitas proses pembelajaran dalam bobot penilaian akreditasi perlu mendapat perhatian. Proses pembelajaran harus mendukung

perkembangan kognisi anak untuk mendukung proses berpikir siswa dalam tiga ranah, yakni pengetahuan, pemahaman, dan penalaran (Mahdiannur, 2014; Mahdiannur, Nur, & Supardi, 2016). Proses pembelajaran yang layak tidak harus didukung oleh sarana dan prasarana yang serba canggih dan modern. Sarana dan prasarana proses pembelajaran harus mendukung fleksibilitas konsep siswa dengan memanfaatkan bahan-bahan alam dan material yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar (Mahdiannur, 2013). Komponen orientasi 'interaksi manusia' pada suatu sistem pendidikan akan memengaruhi pemberdayaan, komitmen, dan kepuasan komunikasi yang sejalan dengan praktik peningkatan mutu (Bendermacher, oude Egbrink, Wolfhagen, Leppink, & Dolmans, 2017).

Berdasarkan hal tersebut instrumen akreditasi haruslah menitikberatkan pada performa satuan/institusi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Performa tersebut hendaknya fokus pada pengembangan organisasi satuan/institusi pendidikan, evaluasi terhadap inovasi proses pendidikan yang dilakukan oleh suatu satuan/institusi pendidikan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan oleh satuan/institusi pendidikan, serta pengembangan kurikulum, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian yang digunakan oleh satuan/institusi pendidikan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses pemenuhan SNP oleh satuan/institusi pendidikan mutlak dilakukan, khususnya oleh tim penjaminan mutu internal suatu satuan/institusi pendidikan. Masyarakat akan berperan penting dalam mendukung dan mengakselerasi pemenuhan seluruh komponen SNP karena masyarakat sangat mendambakan pendidikan yang berkualitas. Peran serta masyarakat juga dapat 'memaksa' pemerintah untuk memberikan dukungan politik dan berbagai kebijakan yang mendukung satuan/institusi pendidikan untuk memenuhi seluruh SNP.

D. Kesimpulan

Masyarakat menafsirkan akreditasi hanya sebatas syarat untuk memperoleh pekerjaan, belum sepenuhnya dimaknai secara komprehensif sesuai makna asal konsep mutu pendidikan. Kaitan antara akreditasi dan mutu pendidikan dengan SNP belum begitu dimengerti oleh masyarakat luas berdasarkan data *Google Trends*. Oleh karena itu, evaluasi sistem penjaminan mutu harus menyatu bersama masyarakat, agar SNP dapat terimplementasi di seluruh Indonesia serta menekankan pada performa satuan/institusi pendidikan yang fokus pada pengembangan organisasi satuan/institusi pendidikan, evaluasi terhadap inovasi proses pendidikan yang

dilakukan oleh suatu satuan/institusi pendidikan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan oleh satuan/institusi pendidikan, serta pengembangan kurikulum, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian yang digunakan oleh satuan/institusi pendidikan.

Referensi

- Bendermacher, G. W. G., oude Egbrink, M. G. A., Wolfhagen, H. A. P., Leppink, J., & Dolmans, D. H. J. M. (2017). Reinforcing pillars for quality culture development: a path analytic model. *Studies in Higher Education*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1393060>
- Briggs, A. R. J., Clark, J., & Hall, I. (2012). Building bridges: understanding student transition to university. *Quality in Higher Education*, 18(1), 3–21. <https://doi.org/10.1080/13538322.2011.614468>
- Chu, S. K. W., Reynolds, R. B., Tavares, N. J., Notari, M., & Lee, C. W. Y. (2017). *21st Century Skills Development Through Inquiry-Based Learning: From Theory to Practice*. Singapore: Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-2481-8>
- Elassy, N. (2015). The concepts of quality, quality assurance and quality enhancement. *Quality Assurance in Education*, 23(3), 250–261. <https://doi.org/10.1108/QAE-11-2012-0046>
- Mahdiannur, M. A. (2013). Sudut Pandang Heuristik Konsep Percepatan Gravitasi Menggunakan Kombinasi Hukum Hooke dan Gerak Harmonik Sederhana Vertikal dalam Pembelajaran Fisika. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains Tahun 2013* (pp. 324–330). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Mahdiannur, M. A. (2014). Perubahan Pemahaman Konsep dan Hasil Belajar Siswa melalui Implementasi Model Pembelajaran Analisis Obyek dan Fenomena Fisika (AOFF): Implikasi terhadap Pola Berpikir Siswa. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika dan Bahasa Inggris 2014* (pp. Fis2-1–Fis2-8). Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Mahdiannur, M. A., Nur, M., & Supardi, Z. A. I. (2016). Dinamika Pemahaman Konsep Siswa SMP pada Materi Energi Normalized Gain versus Normalized Loss. *Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya*, 5(2), 991–1000. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpps/article/download/510/363>
- Okoche, J. M. M. (2017). Internal quality assurance in public and private universities in Africa: Dynamics, challenges and strategies. *European Journal of Economic and Financial Research*, 2(1), 21–45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.264325>
- Orlich, D. C., Harder, R. J., Callahan, R. C., Trevisan, M. S., & Brown, A. H. (2010). *Teaching Strategies: A Guide to Effective Instruction* (9th ed.). Boston: Wadsworth Publishing.

- Sermirikarnjana, P., Kiddee, K., & Pupat, P. (2017). An Integrated Science Process Skills Needs Assessment Analysis for Thai Vocational Students and Teachers. *Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching*, 18(2), Article 3, 1-25.
- Tran, U. S., Andel, R., Niederkrotenthaler, T., Till, B., Ajdacic-Gross, V., & Voracek, M. (2017). Low validity of Google Trends for behavioral forecasting of national suicide rates. *PLOS ONE*, 12(8), e0183149.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183149>
- Williams, J. (2016). Quality assurance and quality enhancement: is there a relationship? *Quality in Higher Education*, 22(2), 97–102.
<https://doi.org/10.1080/13538322.2016.1227207>